



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 0/ TAHUN 2015

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 72 TAHUN 2015  
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas satuan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Mengubah Lampiran I.B.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

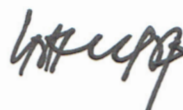
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 17 Desember 2015

Pj. BUPATI WONOSOBO,



SATRIYO HIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 18 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 81

I.B.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

| NO. | PERINCIAN KEGIATAN   | UANG HARIAN)* | BIAYA TRANSPORT      | BIAYA PENGINAPAN     | KETERANGAN   |
|-----|--|---------------|----------------------|----------------------|--|
| 1   | 2  | 3             | 4                    | 5                    | 6  |
| 1   | Perjalanan dinas ke Luar Jawa, DKI, Banten, Jabar, Jatim   |               |                      |                      | Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk melaksanakan tugas kedinasan, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. |
|     | Tingkat A :  |               |                      |                      |  |
|     | Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD  | Rp. 1.400.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |
|     | Tingkat B :  |               |                      |                      |  |
|     | a Sekretaris Daerah  | Rp. 1.200.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |
|     | b Pejabat Eselon II, Anggota DPRD  | Rp. 1.000.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |
|     | Tingkat C :  |               |                      |                      |  |
|     | a Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV   | Rp. 850.000   | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |
|     | b Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III   | Rp. 750.000   | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |
|     | c PNS Golongan II dan I  | Rp. 600.000   | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |
|     | d Pengemudi  | Rp. 500.000   | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |
|     |  |               |                      |                      | a. Uang Harian;<br>b. Biaya Transport dan Biaya Penginapan.  |
|     |  |               |                      |                      | )* Uang Harian meliputi komponen uang saku, uang makan, dan transport lokal yang dibayarkan secara <i>lumpsum</i> dan merupakan batas tertinggi.   |
|     |  |               |                      |                      | Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang dihitung terlebih dahulu ( <i>pre-calculated amount</i> ) dan dibayarkan sekaligus.  |
| 2   | Perjalanan dinas ke Semarang, DIY, dan perjalanan dinas antar kota/kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah (di atas 120 Km) |               |                      |                      | Biaya Riil (At Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.   |
|     | Tingkat A :  |               |                      |                      | Uang harian dihitung sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas, dan untuk Perjalanan/Dinas dalam Daerah kurang dari 5 Km, Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan tidak diberi uang harian.  |
|     | Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD  | Rp. 800.000   | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |
|     | Tingkat B :  |               |                      |                      |  |
|     | a Sekretaris Daerah  | Rp. 600.000   | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |
|     | b Pejabat Eselon II, Anggota DPRD  | Rp. 500.000   | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |

| Tingkat C : |   |  |             |                      |                      |  |  | CPNS, Pegawai Non PNS dan Tenaga Honorer diberikan biaya Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan strata pendidikan :   |
|-------------|---|--|-------------|----------------------|----------------------|--|--|---|
|             | a   | Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV   | Rp. 400.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |   |
|             | b   | Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III   | Rp. 370.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |   |
|             | c   | PNS Golongan II dan I  | Rp. 225.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  | a. Pasca Sarjana, Sarjana / Diploma IV disetarakan dengan PNS Golongan III;   |
|             | d   | Pengemudi  | Rp. 225.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |   |
| 3           |   | Perjalanan dinas antar kota/kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah (81-120 Km) |             |                      |                      |  |  | b. Diploma III dan strata pendidikan dibawahnya disetarakan dengan PNS Golongan II dan I.   |
|             | Tingkat A :                                 |  |             |                      |                      |  |  | Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat diberikan  |
|             | Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD |  | Rp. 700.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang disetarakan dengan PNS Golongan III, sedangkan Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya disetarakan dengan PNS Golongan II dan I. |
|             | Tingkat B :                                 |  |             |                      |                      |  |  |   |
|             | a   | Sekretaris Daerah  | Rp. 500.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |   |
|             | b   | Pejabat Eselon II, Anggota DPRD  | Rp. 400.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |   |
|             | Tingkat C :                                 |  |             |                      |                      |  |  |   |
|             | a   | Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV   | Rp. 350.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |   |
|             | b   | Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III   | Rp. 300.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |   |
|             | c   | PNS Golongan II dan I  | Rp. 200.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |   |
|             | d   | Pengemudi  | Rp. 200.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |   |
| 4           |   | Perjalanan dinas antar kota/kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah (41-80 Km)  |             |                      |                      |  |  | Biaya transport terdiri atas :  |
|             | Tingkat A :                                 |  |             |                      |                      |  |  | a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan;                        |
|             | Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD |  | Rp. 500.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  | b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.  |
|             | Tingkat B :                                 |  |             |                      |                      |  |  |   |
|             | a   | Sekretaris Daerah  | Rp. 400.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |   |
|             | b   | Pejabat Eselon II, Anggota DPRD  | Rp. 350.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |   |

| Tingkat C : |             |   |             |                      |                      |  |  |
|-------------|-------------|---|-------------|----------------------|----------------------|--|--|
|             | a           | Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV  | Rp. 300.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  | Biaya transport dihitung sementara berdasarkan jarak tempuh (Km) dan akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan sesuai pengeluaran riil, dengan ketentuan :<br>a. Apabila menggunakan kendaraan dinas, dipertanggungjawabkan dengan struk pembelian BBM, karcis tol dan karcis parkir.<br>b. Apabila menggunakan kereta api/bus/kapal laut, dipertanggungjawabkan dengan tiket kereta api/bus/kapal laut.<br>c. Apabila menggunakan pesawat udara, dipertanggungjawabkan dengan <i>boarding pass</i> dan tiket pesawat udara. |
|             | b           | Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III  | Rp. 250.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |
|             | c           | PNS Golongan II dan I   | Rp. 170.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |
|             | d           | Pengemudi   | Rp. 170.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |
| 5           |             | Perjalanan dinas antar kota/kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah (10-40 Km) |             |                      |                      |  |  |
|             | Tingkat A : |   |             |                      |                      |  |  |
|             |             | Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD                                 | Rp. 400.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |
|             | Tingkat B : |   |             |                      |                      |  |  |
|             | a           | Sekretaris Daerah   | Rp. 300.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |
|             | b           | Pejabat Eselon II, Anggota DPRD   | Rp. 250.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |
|             | Tingkat C : |   |             |                      |                      |  |  |
|             | a           | Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV  | Rp. 200.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |
|             | b           | Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III  | Rp. 150.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |
|             | c           | PNS Golongan II dan I   | Rp. 100.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |
|             | d           | Pengemudi   | Rp. 100.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |
| 6           |             | Perjalanan dinas dalam Daerah (di atas 25 Km)                               |             |                      |                      |  | Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan tidak boleh melampaui moda transportasi yang telah ditentukan. Dalam situasi dan kondisi tertentu, Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan Tingkat C diperbolehkan menggunakan fasilitas pesawat udara untuk perjalanan dinas dalam Pulau Jawa, dengan ketentuan :   |
|             | Tingkat A : |   |             |                      |                      |  |  |
|             |             | Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD                                 | Rp. 350.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |
|             | Tingkat B : |   |             |                      |                      |  |  |
|             | a           | Sekretaris Daerah   | Rp. 300.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |
|             | b           | Pejabat Eselon II, Anggota DPRD   | Rp. 200.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |  |
|             | Tingkat C : |   |             |                      |                      |  |  |

|   | a | Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV          |  | Rp. 150.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  | a. Surat Tugas dan SPPD bagi Pegawai pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Bupati sedangkan bagi Pegawai pada Organisasi Pemerintah Daerah lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; |
|---|---|---|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|
|   | b | Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III          |  | Rp. 130.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |   |
|   | c | PNS Golongan II dan I                       |  | Rp. 80.000  | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |   |
|   | d | Pengemudi                                   |  | Rp. 80.000  | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |   |
| 7 |   | Perjalanan dinas dalam Daerah (5-25 Km)     |  |             |                      |                      |                      |  | b. Khusus bagi Pegawai yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah, Surat Tugas dan SPPD dapat ditandatangani oleh Kepala OPD terkait.                   |
|   |   | Tingkat A :                                 |  |             |                      |                      |                      |  |   |
|   |   | Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD |  | Rp. 250.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |   |
|   |   | Tingkat B :                                 |  |             |                      |                      |                      |  |   |
|   | a | Sekretaris Daerah                           |  | Rp. 200.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |   |
|   | b | Pejabat Eselon II, Anggota DPRD             |  | Rp. 150.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |   |
|   |   | Tingkat C :                                 |  |             |                      |                      |                      |  |   |
|   | a | Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV          |  | Rp. 100.000 | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |   |
|   | b | Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III          |  | Rp. 80.000  | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |   |
|   | c | PNS Golongan II dan I                       |  | Rp. 60.000  | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |   |
|   | d | Pengemudi                                   |  | Rp. 60.000  | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) | Biaya Riil (At Cost) |  |   |

Pj. BUPATI WONOSOBO,

  
Satriyo Hidayat